

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki 17.499 pulau, sehingga disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Total wilayah Indonesia pun cukup luas, yakni 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015). Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, dan Amerika Serikat (AS) (Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015). Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak. Di sisi lain, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, pemerintah Indonesia harus memikirkan bagaimana cara mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas nasional, demi kesejahteraan ekonomi, dan kemakmuran rakyatnya. Dalam usaha membangun ekonomi nasionalnya tersebut, Indonesia memiliki berbagai macam strategi yang kemudian diimplementasikan baik dalam negeri, maupun luar negeri.

Strategi yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya di kancah Internasional adalah berintegrasi dengan negara-negara lain dalam organisas

regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); Bergabung di berbagai organisasi internasional seperti Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) pada 1989, World Trade Organization (WTO) pada 1994, dan World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) pada 2007; melakukan kerjasama dan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, dan dengan organisasi regional maupun internasional.

Salah satu organisasi regional yang menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan Indonesia adalah European Union (EU) atau Uni Eropa. Uni Eropa merupakan kerjasama kawasan yang berbentuk organisasi antarpemerintahan dan supranasional di bidang politik dan ekonomi. Sebagaimana yang terkutip dalam buku *Isu-Isu Global Kontemporer*, Richard Higgot menyimpulkan, "... Uni Eropa lebih mempunyai kapabilitas untuk melakukan koordinasi kebijakan ekonomi, dan Uni Eropa menjadi contoh kerjasama kawasan yang paling maju dan paling kohesif dibandingkan dengan kerjasama kawasan lain." (Winarno, 2011).

Organisasi yang di dalamnya adalah kebanyakan negara demokrasi Eropa ini, menggantikan beberapa lembaga European Community (EC) pada tahun 1993 (Nau, 2009). Lembaga EC yang digantikan tersebut adalah European Economic Community (EEC). Karena Uni Eropa merupakan transformasi dari EEC, alasan dan tujuan didirikannya Uni Eropa pun masih serupa dengan EEC, yakni mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa. Selain membuat negara-negara Eropa tersebut saling tergantung secara ekonomi,

berdirinya Uni Eropa juga ditujukan untuk menghindari konflik di antara mereka (European Union, t.thn.).

Pembentukan Uni Eropa yang disepakati oleh perjanjian Maastricht ini juga mendorong dibentuknya Euro sebagai mata uang bersama bagi negara-negara anggotanya, dan tiga pilar Uni Eropa, yakni komunitas Eropa (EC), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, serta Urusan Keadilan dan Dalam Negeri (Immanuel & Wahyudi, 2016). Organisasi yang awalnya dibentuk oleh hanya enam negara, yakni Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Italia, dan Luxembourg, sempat memiliki 28 negara anggota hingga akhirnya Inggris memutuskan keluar pada 23 Juni 2016. Tersisa 27, negara-negara anggota Uni Eropa selain enam negara pendirinya adalah Austria, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Kroasia, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, Siprus, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.

Didirikan atas dasar kepentingan ekonomi, Uni Eropa melakukan berbagai macam upaya untuk melanggengkan kepentingannya tersebut. Pertama, mengkoordinasikan kebijakan ekonomi para negara anggotanya, sehingga bisa menghadapi tantangan ekonomi bersama-sama. Commission for Economic Policy (ECON) bersama pemerintahan nasional negara-negara anggota, dan European Central Bank (ECB) berusaha untuk menerapkan sistem Uni Eropa yang lebih baik akan pemerintahan keuangan dan ekonomi, menyediakan pinjaman untuk usaha dan rumah tangga, memperbaiki stabilitas ekonomi, dan melindungi tabungan para nasabah (European Union, t.thn.). Kedua, meluncurkan Euro, mata uang tunggal Eropa yang mempermudah masyarakat Eropa untuk melakukan transaksi perdagangan. Ketiga, membentuk pasar tunggal Eropa yang biasa disebut sebagai pasar internal. Dengan adanya

pasar tunggal ini, masyarakat eropa, uang, barang, dan jasa bisa bebas bergerak di seluruh Uni Eropa. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Uni Eropa melakukan penghapusan hambatan teknis, hukum, dan birokrasi untuk membebaskan pergerakan dan perdagangan antara negara anggotanya (European Union, t.thn.). Sehingga, integrasi ekonomi dapat terwujud, di mana negara anggota bisa berdagang dengan satu sama lain dengan pasar yang sangat luas. Kesempatan berbisnis yang besar, dan daya saing tinggi ini pun kemudian menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya ke Uni Eropa. Keempat, melakukan kerjasama dan perdagangan internasional. Tak hanya mempraktikkan perdagangan bebas di antara negara anggotanya, Uni Eropa juga berusaha untuk meliberalisasi perdagangan dunia. Dengan menyumbang 16,5% dari kegiatan ekspor-impor di seluruh dunia, Uni Eropa menjadi eksportir barang dan jasa, sekaligus pasar import terbesar di dunia (European Union, t.thn.). Uni Eropa bisa terlibat dan memimpin perdagangan dunia seperti itu karena melakukan kerjasama ekonomi, dan membuat perjanjian perdagangan bebas terhadap berbagai partner perdagangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menimbang perkembangan Uni Eropa dan pencapaiannya, Indonesia menganggap Uni Eropa sebagai pasar yang penting. Begitu pun sebaliknya, Uni Eropa juga melihat Indonesia sebagai partner perdagangan dengan potensi yang tinggi seperti yang disebutkan di awal. Dalam tulisannya yang berjudul “Europe and Indonesia: time for stronger engagement”, Eksekutif program senior Pusat Kebijakan Eropa, Shada Islam (2010) pun menegaskan hal tersebut:

Indonesia matters. As world leaders step up engagement with Asia’s rising powers, the focus is not just on China and India but increasingly also on

Indonesia, Southeast Asia's largest economy, most populous nation and arguably one of Asia's most exciting nations. A modern, robust - and recent - democracy, Indonesia is a key Asian member of the G20, a leading player in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and a moderating force within the Organisation of the Islamic Conference (OIC). It is notching up impressive economic growth rates, is the driving force behind many Asian regional integration initiatives and is also strategically located: half of world trade passes by its northern maritime border, giving the country a strategic role in ensuring safe and secure international navigation (hal. 1).

Karenanya, bukan tak mungkin bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Kerjasama tersebut terjalin dengan Indonesia berada di bawah payung ASEAN, sejak 1967 ketika Uni Eropa masih berbentuk EEC (Kementerian Luar Negeri RI, t.thn.). Pada 2009, nilai total impor Uni Eropa mencapai 18% dari perdagangan dunia, yakni US\$1,7 triliun. ASEAN berkontribusi mengekspor 5% dari jumlah tersebut, dan dari angka 5% itu, Indonesia menyumbang 18% di antara negara-negara ASEAN lainnya. (Lord, Oktaviani, & Ruehe, 2010). Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa terkemas dalam program kerjasama pembangunan. Program yang tertuang dalam Country Strategic Programme (CSP) ini, tak hanya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan serta mengentaskan kemiskinan saja, melainkan juga proses demokrasi, pemerintahan yang baik di Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi tersebut meliputi bidang perikanan, makanan hasil pertanian, elektronik, furnitur, dan kosmetik.

Umumnya sebuah hubungan kerjasama, hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa pun memiliki dinamikanya dan tantangannya sendiri. Dalam *Invigorating The Indonesia-EU Partnership: Toward a Comprehensive Economic Partnership Agreement*, kontribusi Indonesia dari total nilai impor Uni Eropa di bidang tekstil, pakaian, dan alas sepatu, mengalami penurunan, yakni sekitar 4,5% di tahun 2001, menjadi sekitar 2,7 % di tahun 2005 (Delegasi Uni Eropa & Kementerian Perdagangan Indonesia, t. Thn). Kemudian, dari grafik yang di dapat dari Eurostat Comext (2016), dapat diketahui bahwa nilai total ekspor Indonesia terhadap Uni Eropa mengalami penurunan pada tahun 2009, 2012, dan 2013 (dikutip dalam Directorate-General for Trade, 2017). Penurunan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Misalnya saja banyak dan ketatnya aturan dan larangan yang diberikan oleh Uni Eropa bagi negara-negara pengekspornya sehingga Indonesia kesulitan menembus pasar Uni Eropa dan memilih untuk mencari pasar lain yang lebih mudah untuk ditembus. Selain permasalahan hambatan yang diberikan oleh Uni Eropa, ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2009 disebabkan oleh terjadinya krisis Uni Eropa pada tahun 2008. Karena krisis Eropa, impor Uni Eropa menurun drastis baik dari sesama negara Uni Eropa maupun negara-negara non Uni Eropa. Penurunan Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2011 dan beberapa tahun setelahnya terjadi karena kalah dalam bersaing dengan negara-negara Asia lainnya yang baru menandatangani dan menerapkan Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Negara-negara tersebut di antaranya adalah Cina yang kemudian menjadi pengekspor terbesar dari Asia bagi Uni Eropa. Lalu ada Vietnam yang setelah menandatangani PCA, pertumbuhan ekspornya terhadap Uni Eropa meningkat dengan sangat pesat dan membuat pertumbuhan ekspor Indonesia terhadap Uni Eropa menurun drastis. Selain penurunan ekspor di tahun-tahun yang telah disebutkan,

pada 2007, Uni Eropa juga melarang semua maskapai penerbangan Indonesia memasuki kawasan udara Eropa (Islam, 2010). Pelarangan ini kemudian tak hanya merugikan Indonesia, namun juga secara Ekonomi. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi Dodo tahun 2008-2017. Indonesia dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil suatu pokok permasalahan, yaitu: “Bagaimana kebijakan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan terhadap Uni Eropa pada 2008-2017?”

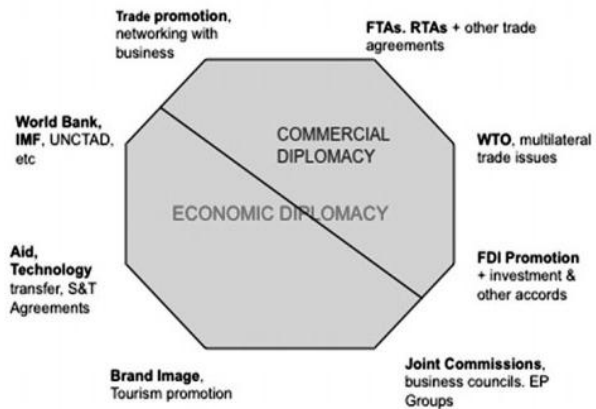
C. Kerangka Dasar Pemikiran

Diplomasi Ekonomi

Menurut Erik Pajtinka (2016), istilah “diplomasi ekonomi” biasanya digunakan dalam dua pengertian dasar. Pengertian pertama, diplomasi ekonomi adalah diplomasi yang memiliki orientasi khusus pada pencapaian kepentingan ekonomi luar negeri suatu negara. Selain Pajtinka, ada beberapa tokoh lain yang juga menjelaskan diplomasi ekonomi dalam pengertian ini. L. Toth dan K. Horvathova (2006, hal. 17) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi adalah, “a specific type of activity of state bodies for economic relationships and their representatives vis-a-vis foreign countries conducted as a part of overall diplomacy of a state with the aim of achievement of goals of the foreign economic policy of a state” (dikutip dalam Pajtinka, 2016, hal. 35). Kemudian, dalam paper yang

berjudul *International economic diplomacy: mutations in post-modern times*, R. Saner dan L. Yiu menjelaskan diplomasi ekonomi sebagai “the activity of diplomatic missions aimed at the promotion of the business and financial sector of the home state with the aim of supporting its economic development” (dikutip dalam Pajtinka, 2016, hal. 35). Diplomasi ekonomi dalam pengertian ini meliputi semua kegiatan diplomatik yang tujuan utamanya adalah pelaksanaan kebijakan luar negeri tertentu demi kepentingan negara tersebut di bidang perekonomian. Pengertian kedua, diplomasi ekonomi adalah penggunaan alat-alat ekonomi untuk mencapai kepentingan apapun suatu negara dalam hubungan internasional. Dalam pengertian ini, diplomasi ekonomi bisa dipahami sebagai bentuk spesifik dari diplomasi yang memaksa. Diplomasi yang memanfaatkan alat-alat ekonomi ini memaksa pihak lawan untuk memberikan izin atau hak diplomatik terhadapnya, dan juga untuk menegaskan kepentingan kebijakan luar negerinya sendiri (Pajtinka, 2016). Dari dua pengertian dasar di atas, Pajtinka mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai seperangkat kegiatan yang spesifik dan spesial dalam diplomasi suatu negara, yang memiliki tujuan untuk menegaskan kepentingan ekonomi luar negeri suatu negara. Mengingat status kepentingan ekonomi yang signifikan dalam keseluruhan hierarki prioritas kebijakan luar negeri suatu pemerintah, diplomasi ekonomi menjadi bagian penting dalam kegiatan kebijakan luar negeri hampir semua negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Mendukung dan melengkapi teori yang disampaikan oleh Pajtinka mengenai diplomasi ekonomi, berikut terdapat bagan yang membedakan antara diplomasi ekonomi dengan diplomasi komersial.



Gambar 1.1 Diplomasi Komersial dan Ekonomi. Economic Diplomacy: India's Experience (hal. 4), oleh Rana & Chatterjee, 2011, New Delhi: Foreign Secretary of India. Copyright 2011 oleh CUTS International.

Bagan yang dikutip dari buku Kishan S. Rana dan Bipul Chatterjee ini menjelaskan bahwa diplomasi komersial merupakan bagian dari perangkat diplomasi ekonomi, sementara diplomasi ekonomi tidak selalu berarti diplomasi komersial.

Menilik dari latar belakang masalah penelitian ini yang disampaikan di awal, alasan Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa dalam bentuk perdagangan internasional adalah untuk menyejahterakan perekonomiannya sehingga bisa memakmurkan rakyatnya. Berdasarkan bagan mengenai diplomasi komersial dan ekonomi di atas, maka diplomasi yang kemungkinan akan digunakan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dengan Uni Eropa adalah diplomasi ekonomi. Kemudian, dikaitkan dengan penjelasan Pajtinka mengenai diplomasi ekonomi dalam dua pengertian di atas,

maka diplomasi ekonomi yang kemungkinan akan dilakukan oleh Indonesia di era kepemimpinan SBY dalam upayanya meningkatkan perdagangan dengan Uni Eropa adalah diplomasi ekonomi menurut Pajtinka dalam pengertian yang kedua, yakni diplomasi yang memiliki orientasi khusus pada pencapaian kepentingan ekonomi luar negeri suatu negara.

D. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, hipotesa yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah, “pemerintah Indonesia pada tahun 2008-2017 akan melakukan diplomasi ekonomi dalam upayanya untuk meningkatkan perdagangan terhadap Uni Eropa. Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia di pada tahun 2008-2017 meliputi:

1. *Free Trade Agreement* Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) sehingga bisa meningkatkan serta memudahkan perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa.
2. *Brand Image* untuk membuat citra Indonesia lebih bagus di bidang perdagangan.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan Indonesia untuk meningkatkan daya jual terhadap Uni Eropa pada 2008-2017.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata I di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan gambaran tentang kebijakan Indonesia untuk meningkatkan daya jual terhadap Uni Eropa pada 2008-2017.
 - b. Memberikan informasi dan masukan kepada peneliti-peneliti yang akan meneliti sesuai dengan judul penelitian penulis.
 - c. Menambah kszanah keilmuan dan literatur kepustakaan dalam lingkup ilmu hubungan internasional.

F. Metode Penelitian

1. Unit Analisa

Dilihat dari objek analisisnya, maka unit analisa dari penelitian ini adalah kerjasama ekonomi yang dalam penelitian ini adalah program kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Uni Eropa.

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan dengan ranah jangkauan yang luas, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat dan hubungan yang dianalisa. Data yang dihimpun adalah data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung. Data tersebut disajikan dalam bentuk verbal dan menekankan pada konsep kontekstual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (library research). Dengan studi kepustakaan ini, penulis berharap bisa menemukan data-data atau fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data kepustakaan yang penulis gunakan berasal

dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan media, serta artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Cara Analisis

Cara analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa penelitian ini adalah cara deskriptif atau eksplanatif.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Setelah pokok permasalahan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Dengan demikian kericuhan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan bisa dihindari serta membuat objek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik. Untuk itu data dalam penulisan ini dibatasi dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Namun, untuk melatarbelakangi atau pun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum mau pun sesudah periode tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Ada pun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang permasalahan yang menjelaskan sekilas tentang kondisi perekonomian Indonesia, kondisi perekonomian Uni Eropa, dan kepentingan Indonesia untuk bekerjasama dengan Uni Eropa. Kedua,

rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Ketiga, kerangka dasar pemikiran, yakni diplomasi ekonomi. Keempat, hipotesa yang dibuat berdasarkan kerangka dasar pemikiran yang digunakan. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Kelima, metode penelitian. Keenam, ruang lingkup penelitian. Terakhir, sistematika penulisan yang menjelaskan rincian penulisan kelima bab yang tergabung dalam penelitian ini.

BAB II Dalam bab ini penulis akan membahas kerjasama Indonesia dengan aktor perdagangan internasional yang lainnya baik itu kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Kemudian akan dibahas juga Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA dan SDM, dan aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Kekayaan SDA dan SDM Indonesia akan dijelaskan dengan menjabarkan tentang komoditas ekspor Indonesia beserta negara tujuan ekspornya. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang bagaimana Indonesia measih membutuhkan negaralain dengan dijabarkannya komoditas impor Indonesia beserta negara asal impornya. Di bab ini juga akan dijelaskan bagaimana perizinan perdagangan luar negeri di Indonesia.

BAB III Membahas perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa. Awal mulanya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia di bawah payung ASEAN dengan Uni Eropa. Kemudian akan dijelaskan

bagaimana peluang Indonesia di pasar Uni Eropa. Terakhir akan ada penguraian tentang kebijakan yang mempengaruhi perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, Komoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa, dan kinerja ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

BAB IV Membahas kebijakan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa pada tahun 2008-2017. Seperti yang dirumuskan pada hipotesa, kebijakan yang dibuat oleh Indonesia untuk meningkatkan perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa adalah melakukan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia adalah membuat FTA dengan Uni Eropa, serta memperbaiki dan meningkatkan brand image dari komoditas-komoditas yang dimiliki oleh Indonesia.

BAB V Merupakan bab terakhir yang menjadi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa yang dibuat.